

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Antagracea Matulatuwa¹, Julie Th. Pelamonia², Wa Asrida³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

²julie.pelamonia@gmail.com

Abstract

This research aims to measure the financial performance of the Regional Government of Central Maluku Regency based on the Value For Money concept, namely from an economic, efficiency, and effectiveness perspective. The type of research used in this research is case study research with a quantitative descriptive approach. The data used is the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report of the Regional Government of Central Maluku Regency for 2016 to 2020. Data was obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Maluku Regency. The data analysis technique in this research uses the concept of value for money with economic ratios, efficiency, and effectiveness. The results of this research show that the financial performance of the Regional Government of Central Maluku Regency based on the Value for Money ratio is quite good. The economic ratio in 2016 was 93.09% which is included in the economic category. From 2017 to 2019 the economic ratio decreased to 89.29%; 89.90% and 86.62% are in the quite economical category. In 2020, the economic ratio increased by 91.06% and was within economic criteria. Meanwhile, for the performance efficiency ratio, in 2016 the performance efficiency ratio was 93.29% and was in the less efficient category. During 2017 to 2020 this ratio fluctuated, namely 85.48%; 82.29%; 80.70%, and 86.51%, and are included in the criteria of being quite efficient. The financial performance effectiveness ratio from 2016 to 2020 is included in the effective criteria where the ratio is 95.84%; 92.84%; 95.47%; 95.20% and 96.62%.

Keywords: financial performance, value for money

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan konsep *Value For Money* yaitu dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 s/d 2020. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep *value for money* dengan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan rasio *Value for Money* tergolong cukup baik. Rasio ekonomis pada tahun 2016 sebesar 93,09% yang termasuk kategori ekonomis. Selama tahun 2017 sampai 2019 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 89,29%; 89,90% dan 86,62% yang berada pada kategori cukup ekonomis. Di tahun 2020, rasio ekonomis mengalami kenaikan sebesar 91,06 % dan berada pada kriteria ekonomis. Sedangkan untuk rasio efisiensi kinerja, di tahun 2016 rasio efisiensi kinerja sebesar 93,29% dan berada pada kategori kurang efisien. Selama tahun 2017 sampai 2020 rasio ini berfluktuasi yaitu sebesar 85,48%; 82,29%; 80,70%, dan 86,51% dan termasuk dalam kriteria cukup efisien. Untuk rasio efektivitas kinerja keuangan selama tahun 2016 sampai 2020 termasuk dalam kriteria efektif dimana besaran rasionya adalah 95,84%; 92,84%; 95,47%; 95,20% dan 96,62%.

Kata kunci: kinerja keuangan, *value for money*

1. Pendahuluan

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pembangunan dalam satu daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut termuat dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kopong, 2019:33). Pengelolaan keuangan daerah juga memerlukan sebuah pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Pengukuran kinerja keuangan

dilakukan untuk menunjukkan apakah pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi konsep *value for money*, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. (Khikmah, 2014 : 3-4). Penerapan konsep *value for money* penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat untuk menilai: Peningkatan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, peningkatan mutu pelayanan publik, penurunan biaya pelayanan publik karena inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan peningkatan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. (Mardiasmo, 2017 : 7)

Kabupaten kawasan tingkat II Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di Maluku yang terwujud dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (L.N.No. 49/ 1952) tentang pembubaran kawasan Maluku Selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Dengan dibentuknya Kabupaten Maluku Tengah maka secara sah diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sistem pemerintahan dan bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2016-2020, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor: 10.A/ HP/ XIX.AMB/ 07/ 2020, ditemui permasalahan yang sering terjadi dalam mencapai realisasi capaian kinerja keuangan di Kabupaten Maluku Tengah yaitu: (1). rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dalam APBD sehingga berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2). kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan daerah otonomi baru.

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2016 s/d 2020 menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 dan 2020 serta mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2019. Presentasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2016 s/d 2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah masih dibawah total anggaran yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya program dengan target yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Handayani (2019) tentang Pengukuran Kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* pada tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio dengan metode *value for money* secara keseluruhan sudah bisa dikatakan ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bila diukur menggunakan konsep *value for money* ditinjau dari rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas selama tahun 2016-2020.

Landasan Teori

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk diakui dalam laporan keuangan sedangkan kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2015:14) tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*)
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas public

Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

BPKP (2000) dalam Mahsun (2016:33) menyatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik yaitu:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Faktor Penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja

Menurut Khalikussabir (2017:5) agar pengukuran kinerja dapat diterapkan dengan efisien dan efektif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja yang dilakukan harus memperhatikan kondisi nyata organisasi
- b. Semua pihak yang terlibat dalam pengukuran kinerja harus mempunyai latar belakang pemikiran bahwa mereka mengukur kinerja satuan kerja bukan bagian dari satuan kerja.
- c. Dukungan dari manajemen puncak, melibatkan para pegawai, menciptakan sistem komunikasi yang baik, adanya kerangka kerja konseptual dan mengkondisikan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam rangka mengaplikasikan pengukuran kinerja dengan sukses.

Konsep Value for Money

Definisi Value for Money

Menurut Mardiasmo (2017:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Manfaat Implementasi Value for Money

Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya serta efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2017:130).

Indikator Value for Money

Menurut Mardiasmo (2017:131-132) peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Indikator alokasi biaya (Ekonomi dan Efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value*

for money yaitu dilihat dari rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektifitas.

Rasio Ekonomi

Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Ang. Belanja}}{\text{Target Ang. Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- (a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis.
- (b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
- (c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis
- (d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.
- (e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis.

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Ang. Belanja}}{\text{Realisasi Ang. Pend.}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- (a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- (b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- (c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- (d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- (e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Rasio Efektivitas

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Ang. Pend.}}{\text{Target Ang. Pend.}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

- (a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- (b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- (c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- (d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- (e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

3. Hasil dan Pembahasan

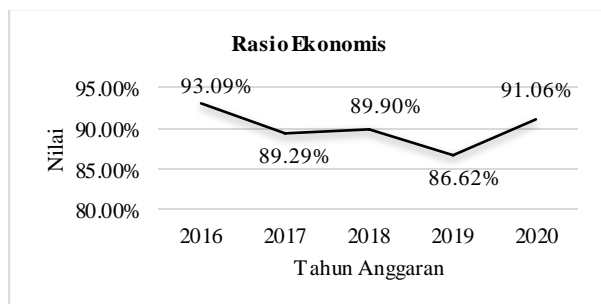
Berikut data hasil perhitungan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Value for Money
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2016-2020
(dalam presentase)

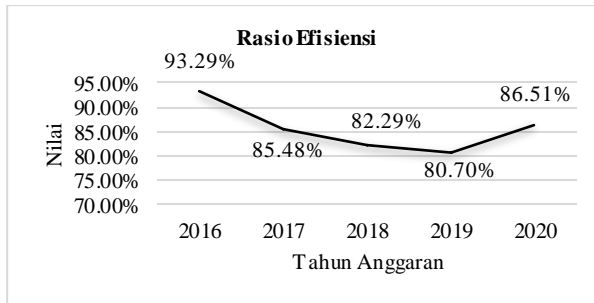
Rasio Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ekonomis	93,09	89,29	89,90	86,62	91,06
Kriteria	Ekonomis	Cukup Ekonomis	Cukup Ekonomis	Cukup Ekonomis	Ekonomis
Rasio Efisiensi	93,29	85,48	82,29	80,70	86,51
Kriteria	Kurang Efisien	Cukup Efisien	Cukup Efisien	Cukup Efisien	Cukup Efisien
Rasio Efektivitas	95,84	92,84	95,47	95,20	96,62
Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Jika digambar dalam bentuk grafik maka grafik pengukuran kinerja *value for money* dari tahun anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut :

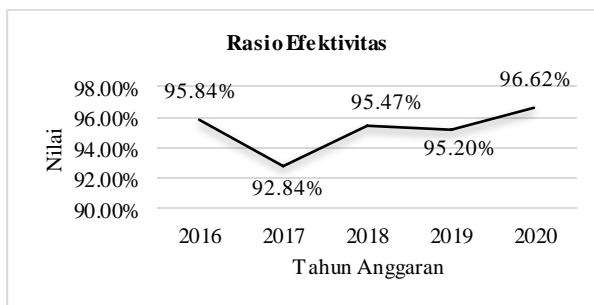
Grafik 1
Perkembangan Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2016-2020



Grafik 2
Perkembangan Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2016-2020



Grafik 3
Perkembangan Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2016-2020



Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi tingkat ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah selama tahun anggaran 2016 dan 2020 berada pada rasio ekonomis tetapi pada tahun anggaran 2017 s/d 2019 berada pada kriteria cukup ekonomis. Temuan ini menunjukkan ketidak konsistensi penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Rasio ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2016 s/d 2020 untuk keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 89,99% yang mana termasuk dalam kategori cukup ekonomis artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah cukup memperhatikan kinerja keuangannya dari segi ekonomis. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan penghematan anggaran dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi.

Rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016-2020 secara keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 85,65% yang mana termasuk dalam kategori cukup efisien. Artinya Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran dikarenakan mampu menghasilkan output dengan input yang serendah-rendahnya.

Rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2016-2020 diperoleh rata-rata sebesar 95,20% yang mana termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sudah

berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

4. Kesimpulan

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan rasio *value for money* tergolong cukup baik, karena selama tahun 2016-2020 kinerja keuangannya berfluktuatif tapi tidak mengalami penurunan rasio yang cukup signifikan. Rata-rata rasio keuangan selama tahun 2016-2020 berada dalam kategori cukup ekonomis, cukup efisien, dan efektif. Namun untuk lebih meningkatkan rasio *value for money* maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah harus optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan hasil kekayaan daerah.

Penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten Maluku Tengah dengan rentang waktu penelitian hanya dilakukan pada tahun 2016 s/d 2020. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan metode *Value for Money* untuk mengukur kinerja keuangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data penelitian yang lebih lama dan menggunakan rasio kinerja keuangan yang lain selain *value of money*.

Daftar Rujukan

- [1] Arikunto, S., 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, Penerbit Rineka Apta, Jakarta*
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019*
- [3] Bastian, I., 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta*
- [4] Fitriah, H., 2019, *Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Skripsi, Masohi: Politeknik Negeri Ambon PDD Masohi*
- [5] Hamid, A. dan Ilyas L., 2019, *Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value for Money, Jurnal Akuntansi Gorontalo, Vol 2, No. 1 - April 2019, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya*
- [6] Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 900/SK/BPKAD/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019.
- [7] Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- [8] Khalikussabir, 2017, *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo), Jurnal Riset Manajemen, Malang: Universitas Islam Malang*
- [9] Kopong, L. S., 2019, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 (Studi Pada Empat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara), Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol 7, No. 1, 2019. Manado: Universitas Sam Ratulangi*
- [10] Khikmah, A., 2014, *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*
- [11] Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta*
- [12] Mahsun, M., 2016, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta*
- [13] Mardiasmo, 2017, *Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI, Yogyakarta*
- [14] Mulyadi, 2016, *Akuntansi Biaya, Penerbit STIE YPKPN, Yogyakarta*
- [15] Nasution, E. P., 2018, *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Keuangan Dan Metode Economic Value Added (EVA) Pada PT. Perkebunan Nusantara III Tahun 2013-2017, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- [16] Peraturan Bupati Maluku Tengah No. 29 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- [17] Portal Resmi Kabupaten Maluku Tengah, *Profil Kabupaten Maluku Tengah*. Online. Diambil Pada Maret 2022 dari <https://maltengkab.go.id/halaman/detail/profil-kabupaten-maluku-tengah>
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [19] Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 (L.N.No 49/1952) tentang Pembubaran Kawasan Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.
- [20] Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- [21] Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- [22] Rahmawati, I. S. dan Nur H., 2019, *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money pada tahun 2014-2018, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*
- [23] Sarmento, C. M. N., 2018, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Air Minum Ira-Mor Dengan Perusahaan Bemor Di Timor Leste (Study Kasus Perusahaan Ira-Mor Dan Perusahaan Bemor, Dili, Timor Leste). Thesis: Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- [24] Sartono, A., 2018, *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2016 berdasarkan Konsep Value for Money. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*
- [25] Solihin, D., 2019, *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money Pada Politeknik Tedc Bandung. Jurnal TEDC, Vol. 13, No. 2 - Mei 2019, Bandung: Politeknik TEDC Bandung*
- [26] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung*
- [27] Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah